



EFEKTIVITAS TRANSFER PUSAT TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI LAMPUNG

Hery Budi Setyawan

Badan Pemeriksa Keuangan, Indonesia. Email: hery.setyawan@bpk.go.id

INFO ARTIKEL

Artikel ini adalah versi singkat dari tesis penulis di Pascasarjana Universitas Lampung

SEJARAH ARTIKEL
Diterima Pertama
29 Agustus 2012

Revisi Pertama
12 Desember 2012

Revisi Kedua
20 Mei 2013

Dinyatakan Dapat Dimuat
21 Mei 2013

KATA KUNCI:
Desentralisasi,
fiskal,
transfer daerah,
panel model,
dana.

ABSTRAK

Implementation of fiscal decentralization has implications on the central transfer through the General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) and Revenue-Sharing Funds (DBH). The central transfer becomes an important factor in the local development dynamics which will bring impact on the economic performance. This article aims to identify the extent of central transfer and macro variable's effectiveness on the economy of Lampung Province. Lampung Province was chosen as object of research, considering that it plays an effective role in connecting Sumatra with Java. Analysis on data from panel is used for ten Regencies / Cities between 2003 and 2009 through three phases: pooled least square (PLS), fixed effect model (FEM) and random effect model (REM). REM model is the best model available for describing the data. Result of estimations shows that DAU and Investment are statistically significant in influencing positive economic growth in Lampung Province. On the other hand, DBH has negative impact on the economy, albeit the magnitude of all three variables is minuscule compared to the entire economy. This indicates ineffectiveness in using central transfer to accelerate growth due to misallocation of budget for consumptive activities compared to investment, which in turn renders capital inefficient and ICOR elevated.

Implementasi desentralisasi fiskal berimplikasi pada transfer pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Transfer pusat tersebut menjadi faktor penting dalam dinamika pembangunan daerah yang akan berperan dalam mempengaruhi kinerja perekonomian. Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana efektivitas transfer pusat dan variabel makro mempengaruhi perekonomian Provinsi Lampung. Provinsi Lampung dipilih sebagai objek penelitian mengingat provinsi ini memiliki peran penting sebagai penghubung pulau Sumatera dengan Jawa. Analisis data panel digunakan untuk sepuluh kabupaten/kota antara tahun 2003-2009 untuk tujuan tersebut melalui tiga tahap estimasi, *pooled least square* (PLS), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM). Model REM merupakan model yang paling baik dalam menjelaskan data. Hasil estimasi menunjukkan bahwa DAU dan Investasi yang secara statistik signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif di Provinsi Lampung. DBH justru berdampak kontras bagi pertumbuhan ekonomi tetapi *magnitude* dari ketiga variabel tersebut relatif sangat kecil bagi perekonomian. Hal ini mengindikasikan terjadinya ketidakefektifan dalam penggunaan transfer pusat dalam mengakselerasikan pertumbuhan yang disebabkan oleh misalokasi anggaran untuk kegiatan konsumtif dibandingkan investasi menjadikan inefisiensi kapital yang cukup besar atau tingginya ICOR.

1. LATAR BELAKANG

Dinamika perekonomian daerah tidak lepas dari keberadaan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak diimplementasikannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 1999. Ketergantungan pemerintah daerah yang besar terhadap transfer pemerintah pusat menunjukkan bahwa transfer pusat telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah (Ermawati, 2009). Dengan adanya transfer diharapkan daerah memiliki keleluasaan dalam membuat kebijakan yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi berdasarkan analisis kebutuhan dan kemampuan daerah.

Dalam perjalanannya, nilai transfer pemerintah pusat pada pemerintah daerah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, mengindikasikan bahwa kemampuan daerah untuk membiayai anggarannya relatif kecil. Sebagai konsekuensi dari penerapan anggaran berimbang, maka pemerintah daerah mendasarkan APBD pada pengeluaran belanja dibandingkan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya, pemerintah daerah menuntut transfer yang lebih besar dari pusat dibandingkan mengeksplorasi sumber penerimaan asli daerahnya (PAD) (Waluyo, 2007). Hal ini

ditunjukkan dari rendahnya kontribusi PAD pemerintah daerah dalam membiaya belanja daerah yang tidak lebih dari 20 persen.

Seperti juga sebagian besar daerah di Indonesia, fenomena peningkatan transfer pemerintah pusat juga terjadi di Provinsi Lampung. Sebagai pintu gerbang pulau Sumatera dari pulau Jawa, Provinsi ini memiliki keunggulan strategis melalui kegiatan ekonomi yang membawa efek multiplier besar. Sektor pertanian masih menjadi kontributor utama perekonomian daerah sebesar 38,93 persen dari total PDRB tahun 2009, diikuti oleh sektor industri pengolahan yang memberikan sumbangan terbesar kedua. Namun, sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki potensi pertumbuhan yang cukup tinggi karena Provinsi Lampung diuntungkan dari padatnya lalu lintas pulau Sumatera-Jawa.

Pada tahun 2004 transfer pemerintah pusat ke Provinsi Lampung terutama yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), mencapai 83 persen dari total transfer yang didapatkan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun sejalan dengan meningkatnya transfer DAK dan DBH, proporsi DAU dari total transfer pusat ke Provinsi Lampung sedikit menurun hingga mencapai 79 persen (2006) sebelum kemudian meningkat kembali menjadi 80 persen ditahun 2008. Antara tahun 2001 dan 2008, DAU telah meningkat tajam hampir 2 kali lipat dari Rp1,7 trilyun menjadi Rp5,2 trilyun (Kem. Keuangan dan BPS, 2008). Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah pusat untuk sarana dan prasarana fisik daerah.

Meskipun nilai transfer pemerintah pusat terus meningkat tajam, sayangnya tidak selalu diikuti oleh perbaikan kinerja ekonomi seperti yang ditunjukkan dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang relatif berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung justru menurun cukup besar dari 5,07 persen menjadi 4,02 persen (DPKD, 2001-2006). Pada periode berikutnya, pertumbuhan terus meningkat sebelum kemudian menurun kembali ditahun 2008. Dominasi peran dana perimbangan terlihat dari kontribusi PAD terhadap APBD yang masih sangat rendah dan bahkan menunjukkan kecenderungan menurun.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak dana transfer pusat terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Secara spesifik studi ini ingin melihat dampak dari dana transfer pusat berupa DAU, DAK, DBH beserta beberapa variabel makro sebagai variable kontrol yaitu investasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Bagian kedua dari tulisan ini berisikan tinjauan pustaka yang terkait dengan hubungan antara dana transfer pusat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar pemikiran dari studi ini mengingat tidak ada teori eksplisit yang menjelaskan hubungan diantara keduanya. Bagian ketiga berisikan metodologi baik sumber data, variabel yang digunakan dan metode estimasi. Bagian kelima

menjelaskan hasil estimasi dan ditutup oleh kesimpulan dan implikasi kebijakan.

2. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DESENTRALISASI FISKAL: SEBUAH TINJAUAN PUSTAKA

Banyak pihak berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja perekonomian pada tingkat makro maupun tingkat lokal (regional). Menurut Oates (1999) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat melalui penganekaragaman pilihan yang lebih berguna bagi efisiensi alokasi (Sasana 2009). Akai dan Sakata (2002) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Hal ini sejalan dengan teori Oates (1999) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal akan mendukung pertumbuhan ekonomi karena akan menciptakan efisiensi ekonomi.

Beberapa penelitian lain justru menunjukkan hal yang sebaliknya dimana desentralisasi ternyata dapat berdampak pada kontraksi perekonomian. Pada umumnya, desentralisasi fiskal di negara berkembang justru menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan inefisiensi melalui misalokasi anggaran dan rendahnya implementasi *good corporate governance*. Desentralisasi fiskal memungkinkan terjadinya korupsi pada level lokal karena memberikan kesempatan kepada politikus dan birokrat lokal mengakses sumber-sumber dana. Dampak negatif desentralisasi umumnya terjadi karena rendahnya kemampuan daerah dalam melakukan pembiayaan pemerintahannya sendiri sehingga menyebabkan meningkatnya tuntutan pembiayaan daerah terhadap pemerintah pusat. Pembiayaan bentuk transfer antar pemerintah (*intergovernmental transfer*) diwujudkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Data APBN menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan proporsi transfer pemerintah pusat ke daerah yang mengindikasikan telah terjadi inefisiensi penggunaan dana APBN untuk sektor pembiayaan jangka pendek dibandingkan pembiayaan jangka panjang seperti investasi. Efektivitas dana transfer tersebut sangat rendah karena penggunaannya terutama untuk pembiayaan rutin misalnya seperti gaji pegawai yang hanya akan memberikan kontribusi bagi konsumsi dibandingkan sebagai investasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari transfer pusat. Dengan adanya transfer maka belanja

daerah akan meningkat dan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat pondasi keuangan daerah. Jika pemerintah daerah mengalokasikan dananya untuk hal produktif, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi jika dana transfer dialokasikan untuk kegiatan konsumtif dan spekulatif maka akan menimbulkan idle money yang berdampak pada pengendalian moneter. Kasus seperti ini terjadi di China dimana desentralisasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat *inflationary* (Brandt and Zhu, 2000).

Teori yang secara khusus menjadi dasar dalam menjelaskan hubungan atau pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi sejauh ini belum ada, meskipun banyak studi empiris yang memberikan rekomendasi bagi pertimbangan pengambil kebijakan dalam mengelola keuangan daerah terutama yang berasal dari transfer pusat untuk mencapai efisiensi bagi perekonomian daerah.

Berbagai studi empiris mencoba menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal dalam berbagai besaran makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan, ketimpangan dan kemiskinan, hingga pada perbaikan infrastruktur baik infrastruktur keras maupun lunak seperti pendidikan dan kesehatan dalam mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan. Keseluruhan studi tersebut menunjukkan kesimpulan yang cukup bervariasi tergantung pada daerah dan rentang waktu penelitian.

Sudhewi dan Wirathi (2013) menemukan bahwa desentralisasi fiskal menurunkan angka kemiskinan di Bali sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi selama periode 2003-2011. Sejalan dengan hal tersebut, Badrudin (2011) menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian dan pola pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Desentralisasi fiskal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tetapi semenjak desentralisasi fiskal diberlakukan terjadi perubahan yang cukup besar dalam pola pengeluaran pemerintah terutama dalam belanja modal, dimana pengeluaran belanja modal tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Ditinjau lebih lanjut, Nuarisa (2013) menemukan bahwa belanja modal di Jawa Tengah sebagian besar justru berasal dari PAD dan DAK, dimana proporsi nilainya terbilang cukup kecil dibandingkan jika berasal dari DAU atau DBH. Akibatnya, efek multiplier yang dihasilkan juga relatif terbatas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karakteristik kekayaan sumber daya daerah ternyata juga memberikan pengaruh yang berbeda dalam menghadapi desentralisasi fiskal, meskipun berada dalam provinsi yang sama. Mardian dan Basri (2012) menemukan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Riau yang relatif tidak memiliki kekayaan alam besar justru memiliki pertumbuhan dan rata-rata pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan wilayah dengan kekayaan alam melimpah. Pada periode 2005 - 2010 hanya Kota Pekanbaru yang digolongkan sebagai daerah maju dari kelompok daerah penerima DBH migas, sementara kabupaten penerima DBH lainnya justru mengalami ketimpangan pendapatan yang lebih besar.

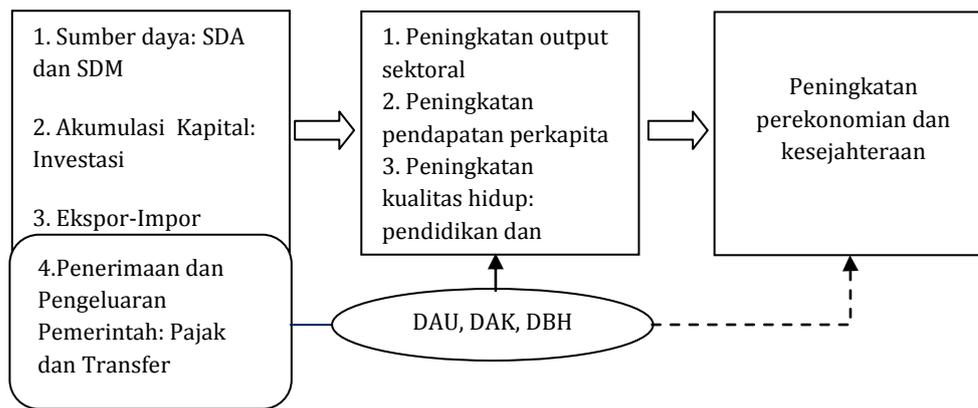
Purusa dan Sasana (2013) mengkaji implikasi desentralisasi fiskal terhadap variabel kesehatan dan pendidikan untuk kasus Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2007 dan 2010. Dengan menggunakan estimasi data panel, mereka menemukan bahwa sejalan dengan desentralisasi fiskal pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peningkatan kualitas kesehatan melalui pengeluaran pemerintah yang secara signifikan mampu menurunkan angka kematian balita. Demikian pula dengan peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi murni berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap variabel desentralisasi fiskal.

Menurut Badrudin (2011), variabel investasi swasta perlu dimasukkan kedalam analisis desentralisasi fiskal untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam dan tajam. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa belanja modal pemerintah yang mencerminkan investasi pemerintah tidak mampu secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Hal ini terutama disebabkan karena alokasi belanja modal yang tidak ditujukan pada investasi produktif jangka panjang.

Berbagai studi diatas memberikan masukan bagi studi ini tentang bagaimana desentralisasi fiskal memberikan pengaruh bagi perkembangan perekonomian di Provinsi Lampung terutama terkait dengan variabel-variabel yang menentukan kesuksesan implementasi desentralisasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya karena memasukkan variabel kontrol lainnya yaitu investasi swasta dan pengaruh angkatan kerja. Secara sistematis, perekonomian suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ketersediaan sumber daya, akumulasi modal, perdagangan baik domestik maupun global serta penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Hubungan diantara faktor tersebut terlihat dari Gambar 1.

Hubungan diantara desentralisasi fiskal dengan peningkatan perekonomian daerah menjadi fokus dari kajian ini. Oleh karena itu hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Transfer DAU pemerintah pusat terhadap kabupaten/kota di Provinsi Lampung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif.
- Transfer DAK pemerintah pusat terhadap kabupaten/kota di Provinsi Lampung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif.
- Transfer DBH pemerintah pusat terhadap kabupaten/kota di Provinsi Lampung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif.



Gambar 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Suatu Daerah

d. Variabel Kontrol diantaranya adalah investasi, dan pendidikan berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Variabel dan Indikator

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai instansi. Data yang digunakan adalah data untuk sepuluh (10) kabupaten/kota di Provinsi Lampung antara tahun 2003-2009, meliputi: Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Tengah, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Tulang Bawang, Tanggamus, dan Way Kanan. Seluruh variabel bebas yang digunakan adalah *moderating variables* yang secara terukur dianggap akan mempengaruhi variabel terikat. Variabel-variabel yang digunakan dalam studi ini diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator	Sumber Data	Hipotesis
PDRB	PDRB harga konstan 2000	Kab/Kota dalam angka, BPS	
Desentralisasi Fiskal	Dana Alokasi Umum (DAU)	Laporan Keuangan Kab/Kota	+
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Laporan Keuangan Kab/Kota	+
	Dana Bagi Hasil (DBH)	Laporan Keuangan Kab/Kota	+
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja Kab/Kota (L)	Kab/Kota dalam angka, BPS	+
Investasi	Investasi pemerintah (Inv)	Laporan Keuangan Kab/Kota	+

3.2. Spesifikasi Model

Akai dan Sakata (2002) memasukkan unsur desentralisasi fiskal melalui transfer pusat untuk melihat pengaruhnya terhadap perekonomian sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha_0 + \beta_2 X_{2i,t} + \beta_3 X_{3i,t} + \beta_4 X_{4i,t} + \beta_5 X_{5i,t} + \beta_6 X_{6i,t} + e_{i,t}$$

dimana:

$Y_{i,t}$: PDRB Kabupaten i tahun t (juta Rp)

β_2 : koefisien DAU

β_3 : koefisien DAK

β_4 : koefisien DBH

β_5 : koefisien TPAK

β_6 : koefisien Investasi

$X_{2i,t}$: DAU Kabupaten i tahun ke t (juta Rp)

$X_{3i,t}$: DAK Kabupaten i tahun ke t (juta Rp)

$X_{4i,t}$: DBH Kabupaten i tahun ke t (juta Rp)

$X_{5i,t}$: Investasi Kabupaten i tahun ke t (juta Rp)

$X_{6i,t}$: TPAK Kabupaten i tahun ke t (persen)

$e_{i,t}$: error term

Keseluruhan data kemudian ditransformasikan kedalam bentuk translog. Selain menyederhanakan satuan dari setiap variabel, bentuk translog juga menunjukkan elastisitas setiap variabel terikat terhadap PDRB.

Model regresi panel dipilih karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan model regresi berganda runtut waktu atau data silang. Selain itu, implementasi desentralisasi fiskal baru berjalan selama 12 tahun serta jumlah kabupaten/kota di Provinsi Lampung hanya sebanyak sepuluh wilayah. Hal ini jelas membatasi jumlah observasi jika menggunakan regresi runtut waktu atau silang tempat sehingga regresi tidak dapat menghasilkan estimasi yang baik.

Analisis model teoritik diterjemahkan kedalam model empirik dalam bentuk *pooled data* (panel) dibawah ini:

$$IPDRB_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_2 I DAU_{i,t} + \beta_3 I DAK_{i,t} + \beta_4 I DBH_{i,t} + \beta_5 I TPAK_{i,t} + \beta_6 I Inv_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

3.3. Metode Estimasi Model dan Tahapan Estimasi

Studi ini memanfaatkan data panel karena memiliki keunggulan dibandingkan model regresi berganda baik runtun waktu (*time series*) maupun data silang (*cross section*). Model regresi data panel mampu mengakomodir kekurangan dari model regresi berganda. Selain itu, kelebihan penggunaan model panel adalah semakin banyak jumlah observasi sehingga akan menghasilkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang lebih besar dan kolinearitas

Tabel 2. Deskripsi statistik PDRB, DAU, DAK, DBH, Investasi dan TPAK dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2003-2009

Variabel	N	Rerata	St. Deviasi	Min	Max
PDRB	70	3,738,892.00	2,424,103.00	475,121.50	11,500,000.00
DAU	70	341,721.30	150,605.50	116,050.00	669,111.80
DAK	70	29,960.82	22,777.48	1,000.00	77,819.00
DBH	70	51,212.51	22,711.29	15,500.98	130,792.90
TPAK	70	68.98	4.80	58.41	79.70
Investasi	64	12,498.71	8,975.13	310.00	29,655.62

Sumber: Hasil Perhitungan

antar variabel bebas. Hasil estimasi yang didapatkan menjadi lebih baik.

Secara umum, terdapat beberapa tahapan dalam mengestimasi model data panel yaitu model regresi panel (*pooled least square/PLS*), *model fixed effect* (FEM), dan *random effect model* (REM). Tahapan yang dilakukan dalam estimasi ini adalah sebagai berikut.

- Estimasi PLS. PLS pada dasarnya adalah melakukan regresi linear berganda dengan data yang ditumpuk (*pooled*) untuk data sepuluh kabupaten/kota di Lampung selama periode 2003-2009. Diluar penggunaannya yang sederhana, metode OLS memiliki pembatasan tertentu (restriksi) terutama pada asumsi klasik. Asumsi koefisien *slope* dan intersep yang konstan disetiap waktu tidaklah realistis dalam menggambarkan kenyataan sebenarnya yang dinamis.
- Estimasi FEM. Asumsi yang digunakan adalah asumsi model FEM yang kedua, dimana koefisien *slope* dianggap konstan namun intersep di setiap kabupaten berbeda.
- Pemilihan model antara PLS dengan FEM dengan menggunakan *Breush-Pagan Lagrange multiplier test* (LM). Jika FEM superior atau lebih baik dibandingkan dengan PLS maka berlanjut ke estimasi REM.
- Estimasi REM. Salah satu kelemahan dari metode FEM adalah ketidakmampuannya dalam menganalisis *time invariant data* atau data yang tidak berubah sepanjang waktu, seperti dengan mengenaan *dummy variable*. Selain itu, metode FEM hanya menunjukkan variasi disetiap kabupaten/kota atau waktu tanpa menunjukkan tingkat signifikansinya. Sebaliknya model *random effect model* (REM) memperhitungkan seluruh residual sehingga *error term*-nya mewakili seluruh variabel yang mempengaruhi variabel terikat yang tidak dimasukkan sebagai variabel bebas.
- Pemilihan model antara FEM dengan REM dengan uji Hausman. (*Hausman test for specification model*) yang memperlihatkan bahwa perbedaan kovarian dari estimator yang efisien dan tidak efisien adalah nol (Green 2007).

4. HASIL ANALISIS

Sebelum dilakukan estimasi data panel dengan menggunakan ketiga metode diatas, perlu dianalisis karakteristik dari data yang digunakan. Secara statistik, ringkasan dari observasi terlihat dari deskriptif statistiknya.

Deskripsi statistik menunjukkan bahwa terdapat total 70 observasi (N=70) untuk masing-masing variabel di tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung antara tahun 2003 dan 2009. Ditinjau dari nilai output yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota, rata-rata PDRB sebesar Rp3,7 trilyun. PDRB terendah sebesar Rp475 milyar dihasilkan oleh Kota Metro ditahun 2003 sedangkan PDRB tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp11,5 trilyun pada tahun 2009. Hal ini mengindikasikan variasi yang cukup tinggi diantara kabupaten dan waktunya. Untuk dana transfer, rata-rata yang dihasilkan (diterima) oleh kabupaten/kota relatif sama antara DAK dan DBH yaitu sebesar Rp22,7 milyar. Sedangkan rata-rata penerimaan DAU terbilang cukup tinggi yaitu sebesar Rp150,6 milyar.

Alokasi DAU yang paling tinggi diterima oleh Kabupaten Lampung Tengah ditahun 2009 yaitu sebesar Rp669 milyar, sedangkan DAU terendah diterima Kota Metro pada tahun 2003 sebesar Rp116 milyar. Untuk DAK, nilai terendah dan tertinggi secara kontradiktif diterima oleh Kabupaten Lampung Selatan ditahun 2003 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1 milyar dan Rp77,8 milyar yang mengindikasikan terjadinya percepatan pembangunan ekonomi di kabupaten tersebut. Sementara untuk DBH terendah diterima Kabupaten Lampung Utara ditahun 2005 sebesar Rp15,5 milyar dan tertinggi diperoleh Kabupaten Tulang Bawang tahun 2007 sebesar Rp130,8 milyar. Nilai DBH ditentukan secara proporsional dari bagi hasil pendapatan pajak dan SDA.

Secara keseluruhan, terlihat bahwa terdapat variasi yang cukup besar diantara kabupaten/kota dalam nilai transfer pusat yang diterima. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan kapabilitas fiskal antar wilayah yang cukup besar di Provinsi Lampung yang juga mencerminkan perbedaan dan kemampuan tiap daerah dalam mendorong pendapatan daerahnya.

Tabel 3. Korelasi antar Variabel PDRB, DAU, DAK, DBH, Investasi dan TPAK

	PDRB	DAU	DAK	DBH	TPAK	Investasi
PDRB	1					
DAU	0,7270	1				
DAK	0,3015	0,7537	1			
DBH	0,5402	0,7206	0,6303	1		
TPAK	-0,0551	-0,0426	0,0025	-0,0099	1	
Investasi	0,6889	0,8178	0,5071	0,5905	-0,1361	1

Sumber: Hasil perhitungan

Variabel makro yang dimasukkan dalam model adalah investasi dan TPAK. Dari data deskripsi statistik diatas terlihat bahwa rata-rata nilai investasi yang diterima tiap kabupaten/kota adalah sebesar Rp8,9 milyar tetapi Kabupaten Way Kanan pada tahun 2003 justru mendapatkan investasi yang paling rendah sekitar Rp310 juta sementara Kabupaten Tanggamus menghasilkan investasi tertinggi yaitu sebesar Rp29,7 milyar ditahun 2009. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Way Kanan relatif tertinggal dalam menarik investasi dibandingkan kabupaten lain di Lampung. Sebaliknya Kabupaten Tanggamus, bersamaan dengan Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah menjadi tujuan investasi yang paling besar di provinsi ini.

Ditinjau dari angka TPAK, variasi setiap wilayah di Provinsi Lampung tidak terlalu besar. TPAK rata-rata sebesar 69 persen dari angkatan kerja, dimana penyerapan angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Lampung Barat (78 persen) dan terendah di Kota Bandar Lampung (58 persen). Perbedaan karakteristik daerah menjadi penyebab utama perbedaan diantara kedua wilayah tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Sebagai ibukota provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Kota Bandar Lampung akan selalu menjadi tujuan urbanisasi pekeja dari kabupaten lain, yang sangat mungkin tidak terserap dalam lapangan kerja formal dan menciptakan pengangguran yang relatif tinggi. Sedangkan Kabupaten Lampung Barat yang termasuk dalam wilayah pedesaan memiliki kompleksitas aktivitas ekonomi yang rendah sehingga cenderung menyerap angkatan kerja yang cukup tinggi.

Tabel 3 menunjukkan nilai korelasi antar variabel. Korelasi antara dua variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8 (80 persen) menjadi indikasi awal adanya permasalahan multikolinearitas. Indikasi tersebut terlihat dari korelasi antara variabel DAU dengan investasi. Artinya, dana DAU sangat mungkin dialokasikan menjadi investasi pemerintah sehingga dalam permodelannya menimbulkan multikolinearitas. Selain korelasi diantara kedua variabel tersebut, korelasi moderat terjadi di hampir seluruh variabel. Misalnya, korelasi antara PDRB dengan DAK (diatas 60 persen), PDRB dengan investasi, DAU dengan DAK, DAU dengan DBH, dan DAK dengan DBH. Korelasi diatas 60 persen

mengindikasikan terjadinya tumpang tindih alokasi dana. Sedangkan korelasi negatif terjadi antara TPAK dengan PDRB, DAU, DBH dan investasi.

Setelah tahapan estimasi dilakukan, uji Hausman menunjukkan bahwa REM superior atau lebih baik daripada FEM dalam menjelaskan data kesepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Oleh karena itu model REM yang digunakan dalam menganalisis dampak transfer pusat terhadap pertumbuhan ekonomi di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Dari hasil estimasi diatas, dapat ditulis ulang menurut model regresi sebagai berikut:

$$IPDRB_i = 8,149 + 0,451DAU_i - 0,012IDAK_i + 0,203IDBH_i + 0,431ITPAK_i + 0,168IInv_i$$

SE (4,46)** (3,44)** (0,37) (-3,04)** (1,16) (4,99)**
 N = 64
 Wald chi²(5) = 201.16**
 R² within = 0,835

Ket: ** menunjukkan bahwa variabel signifikan pada tingkat signifikansi 1persen

Dengan menggunakan REM, model yang diestimasi menghasilkan nilai *F*-hitung (*Wald test*) sebesar 201,16 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang diestimasi dengan REM adalah model yang baik. Keseluruhan variabel independen yaitu pertumbuhan DAU, DAK, DBH, investasi dan TPAK secara bersamaan (simultan) signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Nilai *R*² sebesar 0,84 menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yang diestimasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 84 persen, sedangkan sisanya (16 persen) dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam model atau yang direpresentasikan oleh *error term* ε_i . Estimasi dengan REM berbasis *generalized least square* (GLS) sehingga tidak memiliki hambatan atau keterbatasan untuk memenuhi asumsi klasik guna mencapai estimasi yang BLUE.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa beberapa variabel memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi antara lain DAU, TPAK dan investasi. Sebaliknya DAK dan DBH memberikan dampak kontraktif bagi pertumbuhan. Meskipun demikian, hanya variabel DAU, DBH dan investasi yang secara parsial signifikan mempengaruhi PDRB

pada tingkat kepercayaan 95 persen seperti yang terlihat pada uji t dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

DAU secara signifikan berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga ketika terjadi peningkatan peningkatan DAU sebesar Rp1 juta akan meningkatkan output regional ekonomi sebesar Rp400.000,00. Demikian pula hubungan antara investasi dan PDRB yang juga positif dimana kenaikan investasi sebesar Rp1 juta akan meningkatkan output sebesar Rp168.000,00. Elastisitas investasi terhadap *output* terbilang sangat kecil, yang mengindikasikan inefisiensi ekonomi di Lampung atau tingginya ICOR.

Sementara itu, DBH dan PDRB memiliki hubungan negatif dimana kenaikan DBH sebesar Rp1 juta justru berdampak pada penurunan PDRB sebesar Rp203.000,00. Hasil ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dana dekonsentrasi mengingat DBH sebenarnya adalah pendapatan yang justru dikumpulkan oleh pemerintah lokal sendiri. Hubungan negatif ini kemungkinan terjadi akibat dari pengalokasian DBH pada sektor-sektor produktif atau pada pengeluaran yang bersifat konsumtif. Seperti diketahui sebagian besar dari dana transfer dipergunakan untuk membayar gaji pegawai sehingga hanya memberikan kontribusi pada konsumsi dan tidak memiliki dampak berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAK memiliki hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Seperti juga DBH, DAK tidak mampu menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakanginya. Pertama, dana berupa *block grants* seperti DAK yang berasal dari pusat dengan penggunaan yang telah ditentukan pada program atau sektor tertentu justru menimbulkan inefisiensi akibat dari penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah atau penggunaan anggaran yang tidak tepat pada akhirnya justru memberikan dampak kontraksi bagi perekonomian daerah (Oates 1999).

Kedua, dana transfer pusat yang semestinya ditujukan untuk memperkuat pondasi keuangan daerah melalui pembiayaan pembangunan jangka panjang, namun dalam prakteknya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek misalnya untuk gaji pegawai akibat dari rendahnya kemampuan dan kapabilitas daerah untuk menggunakannya. Ketiga, menurut Brand dan Zhu (2000), dana DAU dan DAK yang seharusnya diarahkan bagi hal-hal produktif bagi perekonomian justru dialokasikan untuk kegiatan konsumtif dan spekulatif yang memiliki dampak inflasioner seperti yang terjadi di Cina.

Jika dilihat dari konteks Provinsi Lampung dimana terdapat keterbatasan penggunaan dana DAK, maka kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan alokasi dana. Kemungkinan yang terjadi adalah program-program yang dibiayai pusat tidak tepat atau tidak sesuai kebutuhan daerah sehingga tidak efektif dalam mendorong output. Kemungkinan lainnya adalah penggunaan dana DAK yang hanya bersifat

formalitas dalam pertanggungjawabannya namun tidak benar-benar dimonitor efektivitasnya.

Dari hasil estimasi diatas, dapat dikatakan bahwa dana transfer pusat belum efektif dalam memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah. Ketidakefektifan dana transfer pusat tentunya sangat disayangkan, mengingat lebih dari 90 persen pembiayaan pemerintah daerah masih berasal dari dana transfer dan hanya kurang dari 5 persen yang didapatkan dari PAD. Ketergantungan pembiayaan dan ketidakefektifan alokasi anggaran akhirnya menjadi dilema bagi pengambil kebijakan. Jika dana transfer diturunkan, maka pembangunan semakin terhambat namun jika tetap diberikan juga tidak memberikan pengaruh besar bagi daerah.

Penyebab dari ketidakefektifan dana transfer pusat bisa dilihat dari alokasi pengeluaran belanja daerah (Tabel 4). Antara tahun 2006 dan 2007, ketika transfer pusat meningkat rata-rata 13 persen dan 11 persen, proporsi belanja pegawai rata-rata sekitar 40 persen dimana Kota Bandar Lampung memiliki pengeluaran tertinggi untuk pegawai sebesar 55 persen, sementara wilayah lainnya hanya berkisar antara 30-40 persen. Peningkatan paling tajam terjadi pada paska tahun 2008, dimana belanja pegawai diberapaya wilayah terutama Kabupaten Lampung Timur meningkat hingga hampir 30 persen, sejalan dengan Kabupaten Tanggamus, Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung yang meningkat masing-masing sebesar 17 persen, 24 persen dan 11 persen.

Menurunnya alokasi transfer pusat sementara pengeluaran gaji pegawai relatif tetap atau bahkan meningkat, menyebabkan terjadinya ketimpangan proporsi belanja APBD. Artinya, terdapat peningkatan jumlah formasi pegawai pemerintah daerah yang mengakibatkan meningkatnya pengeluaran belanja pegawai. Di sisi lain, belanja pegawai merupakan komponen belanja yang paling cepat menyerap anggaran belanja total dibandingkan belanja modal dan barang-jasa. Dari keseluruhan wilayah tersebut, hanya Kota Metro yang relatif memiliki pengeluaran pegawai yang paling kecil. Hal ini cukup wajar mengingat Kota Metro adalah wilayah dengan perekonomian yang relatif kecil. Sebaliknya, Kabupaten Pesawaran yang merupakan kabupaten pemekaran masih sangat bertumpu pada belanja pegawai dalam pengeluaran APBD-nya.

Lebih lanjut, ditinjau dari struktur belanja lainnya terutama barang dan jasa serta modal, ketimpangan antar kabupaten/kota menjadi semakin jelas. Sebagian wilayah menaruh perhatian besar terhadap investasi melalui proporsi belanja yang relatif tinggi atau seimbang dengan belanja modal dan barang-jasa, namun sebagian wilayah lainnya memiliki anggaran yang berat pada belanja pegawai dan barang-jasa. Antara tahun 2006-2007, proporsi belanja modal masih relatif tinggi dibandingkan dengan belanja barang, meskipun masih sedikit dibawah belanja pegawai. Ujian mulai muncul pada periode paska tahun 2008, dimana pertumbuhan dana transfer pusat menurun tajam. Belanja pegawai yang

bersifat *fixed cost* menyerap anggaran yang cukup besar dan mengorbankan belanja lainnya terutama belanja modal. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Tanggamus dan Kota Bandar Lampung merupakan wilayah-wilayah yang memiliki struktur belanja yang relatif timpang dimana belanja modal jauh dibawah anggaran belanja pegawai dan barang. Hanya Kabupaten Way Kanan, Tulang Bawang dan Kota Metro yang tetap konsisten menjaga pengeluaran modalnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung belum optimal akibat alokasinya yang dominan pada belanja pegawai yang bersifat jangka pendek. Maka tidak mengherankan jika pendapatan transfer pusat belum secara efektif memberikan sumbangan bagi peningkatan output daerah.

5. KESIMPULAN

Studi ini mencoba menganalisis pengaruh transfer pusat berupa DAU, DAK dan DBH serta investasi dan TPAK terhadap pertumbuhan ekonomi di sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Model regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh hubungan tersebut dalam rentang waktu 2003-2009.

Regresi data panel yang dilakukan secara bertahap dengan melakukan tiga estimasi yaitu PLS, FEM dan REM. Hasil estimasi dari PLS sangat rentan terhadap permasalahan klasik, sehingga estimasi dengan FEM dan REM harus dilakukan dengan menggunakan standard error yang robust. Hasil estimasi kedua model tersebut tidak jauh berbeda,

sehingga dilakukan uji Hausman untuk memilih mana model yang lebih baik dalam menjelaskan data. Uji Hausman menunjukkan bahwa random effect model lebih baik untuk digunakan dalam model.

Seluruh variabel bebas memiliki arah hubungan (tanda) yang sesuai dengan hipotesis kerja, kecuali variabel DAK dan DBH. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dimana kenaikan laju kedua variabel tersebut justru membawa pada kontraksi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian juga menunjukkan hanya variabel DAU, DAK dan investasi yang signifikan dalam mempengaruhi PDRB sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. DAU memiliki dampak paling besar dalam mendorong pendapatan regional, diikuti oleh investasi. Sementara DAK justru memiliki dampak negatif bagi output daerah. Meskipun investasi berkontribusi terhadap perekonomian, namun efek multipliernya relatif sangat kecil. Hal ini mengindikasikan inefisiensi dalam perekonomian daerah yang umumnya ditandai dengan tingginya nilai ICOR.

Berbeda dengan hasil studi lainnya, dimana desentralisasi fiskal memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, transfer pusat ke Provinsi Lampung memiliki dampak yang relatif rendah yang menunjukkan inefisiensi penggunaan anggaran pusat untuk pembangunan daerah. Hal ini sungguh ironis mengingat pembiayaan pemerintah daerah masih sangat tergantung pada transfer pusat, dan kurang dari 5 persen saja yang mampu dimobilisasi oleh pemerintah daerahnya sendiri

Tabel 4. Alokasi Belanja Daerah 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2006-2009

Daerah	2006			2007			2008			2009		
	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal
Kab. Lampung Barat	35,65	15,12	32,21	36,67	16,05	37,17	37,38	14,67	28,10	38,43	14,16	28,56
Kab. Lampung Selatan	48,72	10,07	10,07	48,27	13,63	31,88	51,39	20,78	16,38	56,69	10,17	18,79
Kab. Lampung Tengah	48,64	15,92	14,38	51,84	24,23	16,98	53,56	32,25	11,53	77,78	8,25	4,58
Kab. Lampung Utara	44,89	10,03	32,10	50,34	15,31	31,64	47,65	17,09	27,76	63,16	26,52	22,55
Kab. Lampung Timur	46,97	13,76	19,24	44,69	19,28	26,75	48,36	23,23	21,69	72,88	12,58	10,69
Kab. Tanggamus	51,90	11,59	24,02	49,55	14,00	27,72	62,94	21,67	11,96	79,28	14,94	9,28
Kab. Tulang Bawang	38,19	18,32	23,83	33,89	23,82	29,69	46,65	23,35	25,36	54,94	18,23	22,40
Kab. Way Kanan	40,13	15,34	29,21	38,94	17,91	38,47	35,67	21,77	39,19	35,30	30,10	43,54
Kota Bandar Lampung	54,87	12,42	18,98	56,00	20,27	17,12	52,20	31,81	16,04	61,43	61,43	10,27
Kota Metro	40,17	23,34	19,01	46,70	22,08	22,78	51,68	16,77	18,92	4,52	16,77	21,67
Kab. Pesawaran	35,65	15,12	32,21	36,67	16,05	37,17	37,38	14,67	28,10	38,43	14,16	28,56

Sumber: DJPK, 2012 (Diolah)

melalui PAD. Dengan kata lain, terjadi permasalahan efektivitas anggaran di daerah ini dimana ketergantungan pembiayaan dari pusat ternyata tidak memberikan pengaruh bagi perekonomian.

Kondisi tersebut memunculkan beberapa indikasi. Pertama, adanya indikasi penyaluran DBH yang tidak semestinya pada alokasi yang bersifat konsumtif sehingga tidak berpengaruh bagi perekonomian selain dari peningkatan konsumsi. Kedua, alokasi DAK umumnya digunakan pada pengeluaran yang memberikan dampak jangka panjang, misalnya sarana infrastruktur, pendidikan atau kesehatan yang tidak langsung dapat dilihat pengaruhnya pada perekonomian. Dalam studi ini, tidak menggunakan lag waktu yang mencukupi untuk melihat dampak jangka panjang.

6. IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN KETERBATASAN STUDI

Merujuk pada hasil studi, diperlukan beberapa pembenahan terutama dalam hal kebijakan bagi pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Lampung sehingga dana transfer pusat dapat efektif mendorong pertumbuhan. Penggunaan dana transfer pusat sekiranya dipergunakan untuk memperkuat pondasi keuangan daerah sehingga alokasinya harus pada kegiatan-kegiatan produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian, terutama pada investasi infrastruktur dan pendidikan. Pengalokasian dana yang timpang pada pengeluaran yang bersifat konsumtif dan bukan investasi hanya akan memberikan dampak *inflasioner*. Lebih lanjut, kebocoran dana harus semakin diminimalisir. Hal ini sejalan dengan rekomendasi berbagai studi yang menyatakan bahwa guna mendapatkan manfaat yang optimal dari momentum desentralisasi fiskal terdapat beberapa persyaratan, seperti (1) Manajemen pemerintahan yang baik atas dasar integritas dan profesionalisme. (2) APBD harus dikelola secara transparan, efisien, efektif, akuntabel dan partisipatif yang harus mencerminkan setiap implementasi kebijakan keuangan daerah dalam peranggungjawaban APBD (Badrudin 2011). (3) Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar dalam pembiayaan pembangunan terutama untuk prasarana di wilayah yang tertinggal dengan menafaatkan dana transfer DBH untuk infrastruktur transportasi, listrik dan pengembangan ekonomi lokal (Mardiana dan Basri 2012).

Studi ini tidak lepas dari beberapa kelemahan. Pertama, studi ini hanya meliputi Provinsi Lampung dan tidak mengikutsertakan provinsi lain. Akibatnya, hasil dari studi ini tidak merepresentasikan wilayah yang lebih luas dan hanya berlaku bagi Provinsi Lampung. Demikian pula dengan rentang waktu yang menjadi fokus hanya antara 2003-2009 sehingga implementasi otonomi sebelum periode dan setelah periode tersebut tidak bisa tertangkap. Kedua, studi ini tidak melakukan uji *endogenitas* yang umumnya digunakan untuk menyeleksi variabel bebas yang

paling representatif dalam mempengaruhi perekonomian Lampung. Namun karena model yang digunakan dalam studi ini memiliki dasar teoritis dan model empiris yang cukup maka diasumsikan model yang digunakan sudah baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akai, Nobuo and Masayo Sakata, 2002, "Fiscal decentralization contributes to economic growth; evidence from state-level cross section data for the United States", *Journal of Urban Economics*.
- Badrudin, R., 2011, "Effects of Fiscal Desentralisation on Capital, Growth and Welfare", *Economic Journal of Emerging Markets*, Vol. 3(3): 211-223.
- Brandt, L dan Zhu, Z., 2000, "Redistribution in a Decentralized Economy: Growth and Inflation in China Under Reform." *The Journal of Political Economy* Vol. 108 (2), April.
- Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), 2001-2008, Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- Ermawati, Tuti., 2009, *Analisis Pengaruh Intergovernmental Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Indonesia Pada Era Desentralisasi Fiskal*, Thesis, FE Universitas Indonesia, *Unpublished*.
- Green, W.H., 2007, "Econometric analysis, 5th Edition", Prentice Hall, NY.
- Mardiana dan Basri, S., 2012, "Desentralisasi Fiskal dan Disparitas Regional di Provinsi Riau", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 20(4), Desember.
- Naganathan, M. dan K.J. Sivagnam., 1999, "Federal Transfers and Tax Efforts of States in India", *Indian Economic Journal*, No. 47(4): 101-110.
- Nuarisa, S.A., 2013, "Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal", *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1(3).
- Oates, Wallace., 1999, "An Essay on Fiskal Federalism", *Journal of Economic Literature*, Vol. 37.
- Purusa, M.S., and Sasana, H., 2013, "Implikasi Desentralisasi Fiskal terhadap AKABA dan APM SD/MI di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010", *Diponegoro Journal of Economics*, Vol. 2(1): 1-12.
- Sasana, Hadi., 2009, "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10(1): 103-124.
- Sudewi, N.A. dan Wirathi, I.G.A.P., 2013, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Propinsi Bali", *E-journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2(3): 135-141.
- Waluyo, Joko., 2007, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*, Simposium FE Universitas Indonesia, 12 Desember.

Hasil regresi REM

```

Random-effects GLS regression              Number of obs   =       64
Group variable: i                        Number of groups =       10

R-sq:  within = 0.8354                    Obs per group:  min =       6
        between = 0.5691                  avg =            6.4
        overall = 0.5305                  max =            7

Random effects u_i ~ Gaussian            Wald chi2(5)    =    244.59
corr(u_i, X) = 0 (assumed)              Prob > chi2     =    0.0000

```

	ly	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
lx2		.4519253	.1177108	3.84	0.000	.2212163	.6826342
lx3		-.0120592	.0329431	-0.37	0.714	-.0766266	.0525081
lx4		-.2026586	.0672459	-3.01	0.003	-.3344582	-.0708591
lx5		.4314801	.3872122	1.11	0.265	-.3274418	1.190402
lx6		.1675945	.0264702	6.33	0.000	.1157139	.2194752
_cons		8.149089	1.88093	4.33	0.000	4.462534	11.83564
sigma_u		.50035943					
sigma_e		.0877583					
rho		.97015622	(fraction of variance due to u_i)				

Ringkasan Hasil Estimasi Model *Pooled Least Square*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*

Variabel Penjelas	Koefisien		
	PLS	FEM	REM
Konstanta (X ₁)	8,149 (4,46)**	8,54 (4,52)**	8,15 (4,46)**
DAU (X ₂)	0,452 (3,54)**	0,414 (3,44)**	0,452 (3,54)**
DAK (X ₃)	-0,012 (-0,36)	0,000096 (0,00)	-0,012 (-0,36)
DBH (X ₄)	-0,203 (-3,04)**	-0,201 (-3,49)**	-0,203 (-3,04)**
TPAK (X ₅)	0,431 (1,16)**	0,428 (1,05)	0,431 (1,16)
Investasi (X ₆)	0,168 (4,99)**	0,166 (6,51)**	0,168 (4,99)**
N	64	64	64
F-hitung	201,16**	38,94	201,16**
R ² within	0,835	0,836	0,835

Keterangan: ** menunjukkan bahwa variabel signifikan pada tingkat signifikansi 1%

Hasil uji Hausman

---- Coefficients ----				
	(b)	(B)	(b-B)	sqrt(diag(V_b-V_B))
	fixed	random	Difference	S.E.
1x2	.4143074	.4519253	-.0376178	.
1x3	.0000957	-.0120592	.0121549	.0092955
1x4	-.2012514	-.2026586	.0014072	.
1x5	.4281232	.4314801	-.0033569	.1718245
1x6	.1656781	.1675945	-.0019164	.

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(5) = (b-B)' [(V_b-V_B)^(-1)] (b-B)
 = 1.22
 Prob>chi2 = 0.9432
 (V_b-V_B is not positive definite)